

PRODUK DOMETIK REGIONAL BRUTO PROVINSI BANTEN

Menurut Pengeluaran

2020-2024



Volume 24, 2025



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BANTEN**

PRODUK DOMETIK REGIONAL BRUTO PROVINSI BANTEN

Menurut Pengeluaran

2020-2024

<https://banten.bps.go.id>

Volume 24, 2025



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BANTEN**

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
PROVINSI BANTEN MENURUT PENGELUARAN
2020-2024
Volume 24, 2025**

Katalog : 9302020.36

ISSN : 2622-1179

Nomor Publikasi : 36000.25015

Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman : xii+96 halaman

Penyusun Naskah : Badan Pusat Statistik Provinsi Banten

Penyunting : Badan Pusat Statistik Provinsi Banten

Pembuat Kover : Badan Pusat Statistik Provinsi Banten

Penerbit : ©BPS Provinsi Banten

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Banten

TIM PENYUSUN

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI BANTEN
MENURUT PENGELOUARAN 2020-2024
Volume 24, 2025**

Pengarah
Faizal Anwar

Penanggung Jawab
Awang Pramila

Penyunting
Awang Pramila

Penulis Naskah
Khafid Akhiriyanto
Puji Aditia Sulistiani

Penata Letak
Khafid Akhiriyanto

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut pendekatan pengeluaran, disusun sebagai salah satu perangkat data ekonomi untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah ataupun sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi di dalam menyusun formulasi kebijakan pembangunan. Pada publikasi ini, telah menggunakan tahun dasar 2010 serta menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada Tim Penyusun dan semua pihak baik instansi/lembaga pemerintah maupun swasta yang telah berkontribusi dalam mewujudkan publikasi ini. Disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Atas masukan yang bersifat konstruktif disampaikan ucapan terima kasih.

Semoga bermanfaat.

Serang, Maret 2025
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Banten

Faizal Anwar

DAFTAR ISI
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI BANTEN
MENURUT PENGELOUARAN 2020-2024
Volume 24, 2025

	Halaman
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB).....	3
1.2 KEGUNAAN STATISTIK PDRB.....	5
BAB 2 METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	7
2.1 PENGELOUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA.....	9
2.2 PENGELOUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT	13
2.3 PENGELOUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH.	17
2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)	21
2.5 PERUBAHAN INVENTORI.....	26
2.6 EKSPOR DAN IMPOR BARANG SERTA JASA	31
BAB 3 TINJAUAN PEREKONOMIAN BANTEN BERDASARKAN PDRB PENGELOUARAN PROVINSI BANTEN 2020-2024...	35
3.1 TINJAUAN AGREGAT PDRB BANTEN MENURUT PENGELUARAN	37
3.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA.....	44
3.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT	50
3.4 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH.....	51

	Halaman
3.5 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)	53
3.6 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI.....	56
3.7 PERKEMBANGAN EKSPOR LUAR NEGERI BARANG DAN JASA.....	57
3.8 PERKEMBANGAN IMPOR LUAR NEGERI BARANG DAN JASA.....	59
3.9 PERKEMBANGAN NET EKSPOR ANTAR DAERAH...	61
 BAB 4 PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT PENGELUARAN PROVINSI BANTEN 2020-2024.....	63
4.1 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (NOMINAL).....	65
4.2 PERBANDINGAN PENGELUARAN PDRB UNTUK KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP EKSPOR	67
4.3 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB	68
4.4 PROPORSI KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PDRB.....	69
4.5 PERBANDINGAN EKSPOR LUAR NEGERI TERHADAP PMTB	70
4.6 PERBANDINGAN PDRB TERHADAP TOTAL IMPOR	71
4.7 KESEIMBANGAN TOTAL PENYEDIAAN DAN TOTAL PERMINTAAN	72
4.8 NERACA PERDAGANGAN (<i>TRADE BALANCE</i>).....	73
4.9 RASIO PERDAGANGAN INTERNASIONAL (RPI).....	75
4.10 <i>INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)</i>	76
 BAB 5 PENUTUP	79
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	85

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran di Provinsi Banten (miliar rupiah), 2020–2024.....	38
Tabel 2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran di Provinsi Banten (miliar rupiah), 2020–2024.....	39
Tabel 3 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran di Provinsi Banten (miliar rupiah), 2020–2024.....	41
Tabel 4 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran di Provinsi Banten (miliar rupiah), 2020–2024.....	42
Tabel 5 Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran di Provinsi Banten (miliar rupiah), 2020–2024	43
Tabel 6 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga di Provinsi Banten, 2020–2024	45
Tabel 7 Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga di Provinsi Banten (persen), 2020–2024	46
Tabel 8 Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga di Provinsi Banten (persen), 2020–2024	47
Tabel 9 Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga di Provinsi Banten (persen), 2020–2024	49
Tabel 10 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit (LNPRT) di Provinsi Banten, 2020–2024	50
Tabel 11 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah di Provinsi Banten, 2020–2024	52
Tabel 12 Perkembangan dan Struktur PMTB Provinsi Banten, 2020–2024.....	54

Halaman

Tabel 13 Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori di Provinsi Banten, 2020–2024.....	56
Tabel 14 Perkembangan Ekspor Luar Negeri Barang dan Jasa di Provinsi Banten, 2020–2024.....	58
Tabel 15 Perkembangan Impor Luar Negeri Barang dan Jasa di Provinsi Banten, 2020–2024.....	59
Tabel 16 Perkembangan Net Ekspor Antar Daerah di Provinsi Banten, 2020–2024.....	61
Tabel 17 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB per Kapita Provinsi Banten, 2020–2024.....	66
Tabel 18 Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir	67
Tabel 19 Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga Terhadap PMTB, 2020–2024.....	68
Tabel 20 Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB Provinsi Banten, 2020–2024	69
Tabel 21 Rasio Ekspor Luar Negeri Terhadap PMTB (ADHB) Provinsi Banten, 2020–2024.....	70
Tabel 22 Rasio PDRB Terhadap Impor Provinsi Banten, 2020–2024	71
Tabel 23 Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Provinsi Banten, 2020–2024.....	72
Tabel 24 Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Provinsi Banten, 2020–2024.....	74
Tabel 25 Rasio Perdagangan Internasional Provinsi Banten, 2020–2024.....	75
Tabel 26 <i>Incremental Capital Output Ratio</i> Provinsi Banten, 2020–2024.....	77

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran di Provinsi Banten, 2020–2024	87
Lampiran 2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran di Provinsi Banten, 2020–2024.....	88
Lampiran 3 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran di Provinsi Banten, 2020–2024	89
Lampiran 4 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Konstan 2010 Menurut Pengeluaran di Provinsi Banten, 2020–2024	90
Lampiran 5 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Berlaku Menurut Pengeluaran di Provinsi Banten, 2020–2024	91
Lampiran 6 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran di Provinsi Banten, 2020–2024	92
Lampiran 7 Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran di Provinsi Banten, 2020–2024	93
Lampiran 8 Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran di Provinsi Banten, 2020–2024	94
Lampiran 9 Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100) Menurut Pengeluaran di Provinsi Banten, 2020–2024	95
Lampiran 10 Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100) Menurut Pengeluaran di Provinsi Banten, 2020–2024	96

BAB 1

PENDAHULUAN

1 PENDAHULUAN

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat struktur ekonomi serta perubahannya. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 yang telah mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

1. Menurut Pendekatan Produksi,

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi

17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalian, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi, 12. Real Estat, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dapat dirinci lagi menjadi beberapa sub-sub kategori lapangan usaha.

2. Menurut Pendekatan Pendapatan,

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

3. Menurut Pendekatan Pengeluaran,

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah

barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya termasuk pajak tak langsung neto.

1.2 KEGUNAAN STATISTIK PDRB

Data PDRB adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian wilayah setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu wilayah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.

6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi, dan perdagangan luar negeri.
7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna sebagai pendekatan untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.



BAB 2

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

2 METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

2.1.1 Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

2.1.2 Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya adalah kelompok makanan dan perumahan.

2.1.3 Cakupan

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu region. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (*United*

Nations), sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun karena keterbatasan data, maka 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi hanya 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sebagai berikut:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);

Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan

rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).

- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen diluar wilayah atau diluar negeri (diperlakukan sebagai impor)

Terdapat beberapa catatan yang perlu dikatahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut)
- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.
- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

2.1.4 Penghitungan PKRT Tahunan

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah:

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dan jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

2. Metode Penghitungan

Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Susenas. Akan tetapi, karena hasil estimasi data pengeluaran rumah tangga yang berasal dari Susenas cenderung *underestimate* (terutama untuk kelompok bukan makanan dan kelompok makanan jadi), maka perlu dilakukan penyesuaian (*adjustment*). Dalam melakukan *adjustment*, digunakan data sekunder dalam bentuk data atau indikator suplai dari berbagai sumber data di luar Susenas. Setelah diperoleh hasil *adjustment*, maka yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan pada data sekunder. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu. Hal ini dilakukan karena hasil penghitungan dari data sekunder dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara metode deflasi yaitu mendeflate PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sbb:

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:
 - a. Makanan = pengeluaran konsumsi perkapita seminggu \times (30/7) \times 12 \times jumlah penduduk pertengahan tahun
 - b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi perkapita sebulan \times 12 \times jumlah penduduk pertengahan tahun;
2. Data poin ke 1 dikelompokan menjadi 7 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas yang mungkin dikontrol secara tersendiri;
3. Terhadap data poin ke-2 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu;
4. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah di-adjust;
5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. PKRT adh konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke 4 dengan hasil poin ke 5.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

2.2.1 Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LN PRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian

wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumahtangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

2.2.2 Konsep dan Definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non-profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumah tangga.

Karakteristik unit LNP adalah sebagai berikut :

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau *surplus*, karena profit yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- istilah *non-profit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan *surplus* melalui kegiatan produktifnya, namun *surplus* yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi profesi, perkumpulan kegiatan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, dan organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

2.2.3 Cakupan

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

- a. Konsumsi antara, contoh: pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

2.2.4 Penghitungan PK-LNPRT Tahunan

1. Sumber data

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SK-LNP).
Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil *up-dating* direktori LNPRT.
Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Indeks Harga Konsumen (IHK)

2. Metode Penghitungan

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sbb :

- Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenis-nya dihitung dengan rumus sbb :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

x_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : Jenis lembaga LNPRT, $= 1, 2, 3, \dots, 7$

j : jenis pengeluaran LNPRT, $= 1, 2, 3, \dots, 19$

- Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sebagai berikut :

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PK-LNPRT adh Berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

2.3.1 Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif, maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu daerah/negara. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir, sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang & jasa maupun aktivitas investasi.

2.3.2 Konsep dan Definisi

Nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank di masing-masing provinsi, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sebagai berikut:

1. Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan, dan sebagainya. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

2.3.3 Cakupan

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan

mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Provinsi mencakup: a. PK-Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah provinsi; b. PK-Pemerintah Provinsi yang bersangkutan; c. PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Provinsi; d. PK-Pemerintah Desa/Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Provinsi bersangkutan.

2.3.4 Penghitungan PDRB Tahunan

1. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Provinsi Tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
- b. Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)
- c. Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- d. Output Bank Indonesia masing-masing provinsi (BI)
- e. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

2. Metode Penghitungan

a. PK-P Provinsi adh Berlaku

Secara umum, PK-P adh Berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut:

$$\text{PK-P adh Berlaku} =$$

Output non pasar – penjualan barang dan jasa + output Bank Indonesia

Output non-pasar dihitung dengan pendekatan biaya yang dikeluarkan (*at cost*), yaitu: Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level Provinsi, PK-P Provinsi adh Berlaku, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah provinsi itu sendiri + pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan kabupaten/kota yang ada di wilayah provinsi tersebut + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah provinsi tersebut + pengeluaran pemerintah pusat yang menjadi bagian dari provinsi yang bersangkutan.

b. PK-P Provinsi adh Konstan

Pengeluaran konsumsi pemerintah adh Konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank di masing-masing provinsi, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

2.4.1 Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu wilayah/negara. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDRB/PDB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

2.4.2 Konsep dan Definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption*

of Fixed Capital) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

2.4.3 Cakupan

PMTB Terdiri dari:

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;
2. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya (seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

2.4.4 Penghitungan PMTB Tahunan

1. Sumber data
 - a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Prov/Kab/Kota.
 - b. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI) setempat.
 - c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil & Rumah tangga (level provinsi).
 - d. Laporan keuangan perusahaan.

- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi.
- f. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas).
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum.
- i. Publikasi Statistik Konstruksi.
- j. Data Eksplorasi Mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

2. Metode Penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan "langsung" adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Pendekatan "tidak langsung" adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan "arus komoditas". Dalam hal ini penyediaan atau "*supply*" dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan

pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai adh berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB adh Konstan digunakan cara deflasi yaitu PMTB adh Berlaku tersebut di-*deflate* (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik adh Berlaku maupun adh Konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasikan output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB adh Berlaku. Untuk memperoleh nilai adh Konstan adalah dengan cara deflasi yaitu men-*deflate* PMTB (adh Berlaku) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan kedua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara “ekstrapolasi” atau mengalikan PMTB adh

Konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB adh Konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB adh Berlaku, nilai PMTB adh Konstan tersebut *di-reflate* (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB adh Konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

Pertama, PMTB adh Berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rincian tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). Kedua, untuk memperoleh PMTB adh Konstan adalah dengan cara men-deflate PMTB adh Berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB adh Berlaku untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan adh Berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB adh Konstan-nya diperoleh dengan cara deflasi yaitu *men-deflate* nilai adh Berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari Kementerian ESDM dan Badan Pengelola (BP) Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunannya.

Untuk perangkat lunak, PMTB adh Berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang

software. Untuk adh Konstan diperoleh dengan cara deflasi yaitu men-deflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Data impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB adh Konstannya diperoleh dengan cara men-deflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tidak langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.
- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

2.5 PERUBAHAN INVENTORI

2.5.1 Pendahuluan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal.

Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu

wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

2.5.2 Konsep dan Definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses penggeraan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna pertambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan, baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok

seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

2.5.3 Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sebagai berikut :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

2.5.4 Penghitungan Perubahan Inventori

Inventori dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis barang menjadi beberapa kategori, antara lain: barang mentah, yang mencakup bahan

baku yang digunakan dalam proses produksi; barang setengah jadi, yang merupakan produk yang telah melalui beberapa tahap produksi tetapi belum siap untuk dijual; dan barang jadi, yang merupakan produk akhir yang siap untuk dipasarkan.

1. Sumber data

- a. Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- b. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD
- c. Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian;
- d. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- e. Data komoditas perkebunan;
- f. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- g. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- h. Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Banten (ASI), gula dari Dewan Gula Banten (DGI), dan ternak dari Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

2. Metode Penghitungan

Terdapat 2 metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Di lihat dari sisi manfaatnya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori adh berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sebagai berikut:

- menghitung posisi inventori adh Konstan, dengan cara mendeflate stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- menghitung perubahan inventori adh Konstan dengan mengurangkan posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- menghitung perubahan inventori adh Berlaku dengan menginflate perubahan inventori

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori adh Berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori adh Konstan dihitung dengan: a. men-deflate nilai perubahan inventori adh Berlaku dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah bahwa:

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harganya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara *me-mark-up*, untuk melengkapi estimasi pada data-data industri yang informasinya tidak tersedia;

2.6 EKSPOR DAN IMPOR BARANG SERTA JASA

2.6.1 Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan wilayah lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

2.6.2 Konsep dan Definisi

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

2.6.3 Cakupan

Ekspor-Impor pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya
- c. Net Ekspor antar daerah
 - Ekspor Antar Daerah
 - Impor Antar Daerah

2.6.4 Penghitungan Ekspor-Impor Tahunan

1. Sumber data

- a. Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
- b. Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- c. Neraca Pembayaran masing-masing provinsi dari BI
- d. Laporan Pengumpulan Data Sistem Informasi Manajemen Operasional Pelabuhan (SIMOPPEL), yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;

- e. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang;
- f. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei.
- g. Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Banten

2. Metode Penghitungan

Ekspor-Import barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board* (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang, sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang.

Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran masing-masing provinsi (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun non-residen. Sementara untuk net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

BAB 3

TINJAUAN PEREKONOMIAN BANTEN BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN PROVINSI BANTEN 2020-2024

3

TINJAUAN PEREKONOMIAN BANTEN BERDASARKAN PDRB PENGELOUARAN PROVINSI BANTEN 2020-2024

Perubahan struktur ekonomi Provinsi Banten akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2020 s.d 2024, memang tidak lepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir, sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada pendekatan pengeluaran, mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Banten digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, Lembaga Non Profit (LNPRT), dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan perubahan inventori). Berikut diuraikan perilaku dari masing-masing komponen pengeluaran tersebut.

3.1 TINJAUAN AGREGAT PDRB BANTEN MENURUT PENGELOUARAN

Perkembangan perekonomian Provinsi Banten terus mengalami perubahan seiring perkembangan aktifitas perekonomian wilayah dan regional yang mempengaruhinya. Hal ini terlihat dari kinerja perekonomian Provinsi Banten selama periode tahun 2020-2024. Perkembangan ekonomi tersebut digambarkan melalui nilai PDRB atas dasar harga berlaku (adh berlaku) dan atas dasar harga konstan (adh konstan), serta tingkat pertumbuhan pada total PDRB.

Tabel 1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran di Provinsi Banten (miliar rupiah), 2020–2024

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah tangga	345.860,88	360.301,87	399.343,21	427.149,69	464.813,53
2. Konsumsi LNPRT	2.922,92	3.015,58	3.192,70	3.451,65	4.074,35
3. Konsumsi Pemerintah	27.388,52	29.156,76	30.623,92	33.171,72	37.084,34
4. PMTB	219.704,08	235.747,73	257.257,52	279.576,27	296.123,77
5. Perubahan Inventori	13,86	8,59	46,89	30,19	170,64
6. Ekspor Luar Negeri	161.078,95	201.111,67	225.168,67	191.080,14	196.933,52
7. Impor Luar Negeri	365.673,99	513.429,54	568.106,46	541.769,11	618.080,70
8. Net Ekspor Antar Daerah	234.600,16	349.957,64	399.694,40	421.431,49	492.506,81
Total PDRB	625.895,38	665.870,30	747.220,84	814.122,03	873.626,25

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Nilai PDRB Banten (adh berlaku) selama periode tahun 2020 s.d 2024 menunjukkan peningkatan signifikan dari 625.895,38 miliar rupiah menjadi 873.626,25 miliar rupiah. Peningkatan PDRB tersebut seiring dengan membaiknya penanganan pandemi covid-19, dimana setelah sempat terpuruk pada tahun 2020 sudah mulai kembali menuju perbaikan.

Selain dinilai atas dasar harga adh berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai adh konstan 2010 atau adh berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan adh konstan, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran

tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga).

Tabel 2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran di Provinsi Banten (miliar rupiah), 2020–2024

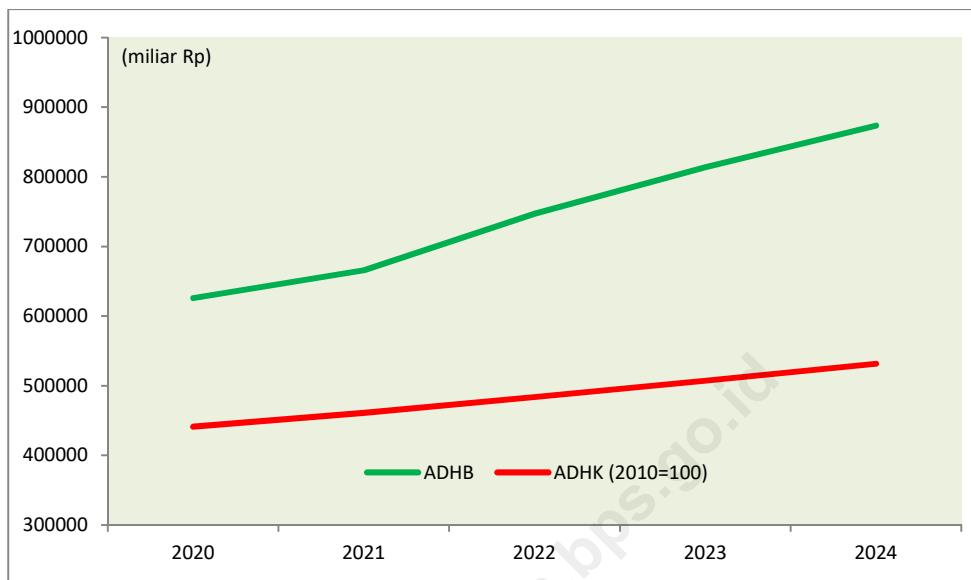
Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah tangga	254.841,26	260.957,05	271.682,54	282.429,45	296.083,53
2. Konsumsi LNPRT	2.117,52	2.080,87	2.122,44	2.199,21	2.503,14
3. Konsumsi Pemerintah	17.758,86	17.935,26	17.973,92	17.985,86	18.775,23
4. PMTB	143.572,83	149.908,85	155.430,59	160.769,56	164.999,07
5. Perubahan Inventori	13,36	6,87	36,38	21,52	116,92
6. Ekspor Luar Negeri	114.223,21	133.588,83	141.451,73	122.323,77	125.141,69
7. Impor Luar Negeri	231.421,54	249.954,45	254.019,93	239.328,31	268.504,57
8. Net Ekspor Antar Daerah	140.043,08	146.429,51	149.451,76	161.024,68	192.620,24
Total PDRB	441.148,58	460.952,79	484.129,42	507.425,74	531.735,25

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

PDRB pengeluaran adh konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2020–2024, gambaran tentang perkembangan ekonomi Banten berdasarkan PDRB adh konstan dapat dilihat pada tabel 2 di atas. Sama halnya dengan PDRB adh berlaku, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB adh konstan juga menunjukkan peningkatan dari 441.148,58 miliar rupiah tahun 2020 menjadi 507.425,74 miliar rupiah di tahun 2024. Namun pada periode

itu dari tren peningkatan sedikit tertahan di tahun 2020 imbas pandemi Covid 19.



Gambar 1 Perbandingan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran di Provinsi Banten (miliar rupiah), 2020-2024

Dari grafik di atas, nampak bahwa pada umumnya nilai PDRB adh berlaku selalu lebih besar dari nilai PDRB adh konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB adh berlaku. Dalam PDRB adh konstan pengaruh faktor harga telah ditidakkan.

Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir LNPRT (PK-LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor-impor luar negeri, serta ekspor neto antar daerah atau ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah.

Tabel 3 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran di Provinsi Banten (miliar rupiah), 2020–2024

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah tangga	55,26	54,11	53,44	52,47	53,21
2. Konsumsi LNPRT	0,47	0,45	0,43	0,42	0,47
3. Konsumsi Pemerintah	4,38	4,38	4,10	4,07	4,24
4. PMTB	35,10	35,40	34,43	34,34	33,90
5. Perubahan Inventori	-	-	0,01	-	0,02
6. Ekspor Luar Negeri	25,74	30,20	30,13	23,47	22,54
7. Impor Luar Negeri	58,42	77,11	76,03	66,55	70,75
8. Net Ekspor Antar Daerah	37,48	52,56	53,49	51,77	56,38
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Berdasarkan tabel 3 di atas, selama periode 2020 s.d 2024, rata-rata produk yang dikonsumsi di wilayah Banten sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga sekitar 53,70 persen. Ekspor Luar Negeri juga mempunyai peran yang relatif besar, rata-rata sekitar 26,42 persen produk Banten mampu menembus pasar internasional, namun demikian impor juga masih mempunyai peran yang relatif besar, karena rata-rata sekitar 69,77 persen permintaan domestik masih dipenuhi oleh produk dari impor luar negeri. Di sisi lain, rata-rata pengeluaran untuk pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai peran relatif besar dengan kontribusi sekitar 34,63 persen. Proporsi konsumsi akhir pemerintah relatif stagnan pada kisaran rata-

rata sebesar 4,24 persen. Hal ini menunjukkan bahwa memang peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar. Rasio konsumsi akhir rumah tangga terhadap PMTB merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Sekilas nampak bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah domestik Banten digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

Tabel 4 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran di Provinsi Banten (miliar rupiah), 2020–2024

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah tangga	-2,01	2,40	4,11	3,96	4,83
2. Konsumsi LNPRT	-8,28	-1,73	2,00	3,62	13,82
3. Konsumsi Pemerintah	-9,51	0,99	0,22	0,07	4,39
4. PMTB	-0,07	4,41	3,68	3,43	2,63
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor Luar Negeri	-4,05	16,95	5,89	-13,52	2,30
7. Impor Luar Negeri	-6,35	8,01	1,63	-5,78	12,19
8. Net Ekspor Antar Daerah	-	-	-	-	-
Total PDRB	-3,39	4,49	5,03	4,81	4,79

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Di sisi lain, dalam periode tahun 2020–2024 perdagangan internasional Banten yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor impor

luar negeri, menunjukkan bahwa nilai ekspor luar negeri cenderung lebih rendah dari nilai impor luar negeri. Kecenderungan perdagangan internasional Banten dalam periode tersebut selalu menunjukkan posisi defisit. Sementara pada perdagangan regional (ekspor impor antar daerah), Banten memiliki nilai ekspor antar daerah lebih tinggi dari nilai impor antar daerah (surplus).

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi.

Tabel 5 Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran di Provinsi Banten (miliar rupiah), 2020–2024

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah tangga	135,72	138,07	146,99	151,24	156,99
2. Konsumsi LNPRT	138,03	144,92	150,43	156,95	162,77
3. Konsumsi Pemerintah	154,22	162,57	170,38	184,43	197,52
4. PMTB	153,03	157,26	165,51	173,90	179,47
5. Perubahan Inventori	103,78	125,08	128,87	140,32	145,95
6. Ekspor Luar Negeri	141,02	150,55	159,18	156,21	157,37
7. Impor Luar Negeri	158,01	205,41	223,65	226,37	230,19
8. Net Ekspor Antar Daerah	167,52	238,99	267,44	261,72	255,69
Total PDRB	141,88	144,46	154,34	160,44	164,30

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Pertumbuhan ekonomi Banten dari tahun 2020 s.d 2024 secara rata-rata mencapai 3,15 persen, dengan pertumbuhan masing-masing -3,39 persen pada tahun 2020 karena adanya pandemi Covid-19, meningkat menjadi 4,49 persen tahun 2021 sedangkan pada tahun 2022 terjadi pemulihan pertumbuhan ekonomi naik menjadi 5,03 persen. Kemudian perekonomian Banten turun menjadi 4,81 persen pada tahun 2023, menjadi 4,79 persen pada tahun 2024.

Sementara itu, indeks implisit PDRB yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen terus meningkat, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan) maupun pada konsumen korporasi swasta untuk pengeluaran investasi dan perubahan inventori, kegiatan ekspor impor luar negeri, serta perdagangan antar wilayah.

3.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Data berikut menunjukkan kondisi dimana sebagian besar produk barang dan jasa domestik maupun produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga.

Tabel 6 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga di Provinsi Banten, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (miliar Rp)	345.860,88	360.301,87	399.343,21	427.149,69	464.813,53
b. ADHK 2010 (miliar Rp)	254.841,26	260.957,05	271.682,54	282.429,45	296.083,53
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	55,26	54,11	53,44	52,47	53,21
Rata-rata konsumsi per kapita/tahun (ribu Rp)					
a. ADHB	29.137,52	29.967,85	32.821,73	34.705,80	37.390,31
b. ADHK 2010	21.469,44	21.704,92	22.329,39	22.947,32	23.817,41
Pertumbuhan					
a. Total konsumsi RT	-2,01	2,40	4,11	3,96	4,83

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Data berikut, menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2020-2024 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan dalam nilai nominal (adh berlaku), kondisi ini sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Akan tetapi pada 2020 terjadi penurunan akibat pandemi Covid-19 sepanjang tahun tersebut, sedangkan tahun 2021 s.d 2023, bahkan tahun 2024 terjadi pemulihan ekonomi yang berimbang dengan peningkatan kembali konsumsi rumah tangga.

Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2020-2024 cenderung menurun. Titik tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu 55,26 persen dan titik terendah terjadi pada tahun 2023 yaitu 52,47 persen. Penurunan di tahun 2023 relatif disebabkan oleh naiknya peranan ekspor antar daerah.

Masa pemulihan ekonomi telah mendorong rumah tangga untuk memperbaiki serta mengembalikan perilaku dan kebiasaan konsumsinya setelah sekian lama mengalami masa-masa krisis. Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga. Secara umum, rata-rata konsumsi per rumah tangga terus meningkat dari tahun ke tahun, baik menurut adh berlaku maupun adh konstan 2010.

Tabel 7 Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga di Provinsi Banten (persen), 2020–2024

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	33,51	34,03	35,04	34,80	34,97
b. Pakaian dan Alas Kaki	4,32	4,21	4,06	3,99	3,85
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	16,44	16,17	15,18	15,29	14,92
d. Kesehatan & Pendidikan	7,75	7,64	7,18	7,04	6,79
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	24,24	24,37	25,33	25,69	26,55
f. Hotel & Restoran	8,86	8,80	8,67	8,65	8,47
g. Lainnya	4,89	4,77	4,54	4,54	4,45
Total Konsumsi Rumah Tangga	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Secara rata-rata dari tahun 2020 s.d 2024 nampak pada struktur konsumsi akhir rumah tangga Banten, bahwa konsumsi bukan makanan

lebih tinggi dibandingkan konsumsi makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung masih berada pada kisaran yang sama. Proporsi untuk makanan pada masing-masing tahun mencapai 33,51 persen (2020); 34,03 persen (2021), 35,04 persen (2022); 34,80 persen (2023) dan 34,97 persen pada tahun 2024.

Secara umum, pertumbuhan total konsumsi rumah tangga (atas dasar harga konstan) Provinsi Banten cenderung fluktuatif tumbuh sebesar -2,01 persen pada tahun 2020, kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 2,40 persen. Sedangkan pada tahun 2022 kembali tumbuh menjadi 4,11 persen, tahun 2023 sedikit melambat menjadi 3,96 persen dan pada tahun 2024 tumbuh 4,83 persen.

Tabel 8 Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga di Provinsi Banten (persen), 2020–2024

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	-2,84	2,80	4,35	3,92	4,88
b. Pakaian dan Alas Kaki	1,39	-0,69	3,20	1,53	1,13
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	3,33	1,16	-0,12	3,61	3,43
d. Kesehatan & Pendidikan	0,57	1,62	1,40	2,85	3,27
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	-4,80	4,23	7,31	4,98	7,23
f. Hotel & Restoran	-4,50	1,38	5,99	4,47	4,00
g. Lainnya	-0,56	-0,06	1,04	2,48	2,45
Total Konsumsi Rumah Tangga	-2,01	2,40	4,11	3,96	4,83

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Pola proporsi konsumsi di atas, menunjukkan tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan yang masih cukup kuat. Sungguhpun demikian, pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya.

Dilihat dari pertumbuhan riil-nya, pengeluaran rumah tangga untuk kelompok makanan, minuman, dan rokok tidak menunjukkan fluktuasi yang terlalu jauh, selama periode 2020 s.d 2024, konsumsi rumah tangga pada kelompok makanan, minuman, dan rokok tumbuh pada kisaran rata-rata 2,65 persen. Pada kelompok non makanan terjadi fluktuasi pertumbuhan yang berbeda sesuai dengan kelompok komoditinya. Fluktuasi tertinggi terjadi pada konsumsi rumah tangga pada kelompok hotel dan restoran yang mengalami penurunan hingga minus 4,50 persen di tahun 2020, meningkat menjadi 1,38 persen tahun 2021, tumbuh menjadi 5,99 persen tahun 2022 dan tumbuh 4,47 persen tahun 2023. Sedangkan pada tahun 2024 tumbuh melambat 4,00 persen.

Perkembangan pola konsumsi rumah tangga pada kelompok hotel dan restoran tersebut, terkonfirmasi juga melalui fluktuasi konsumsi rumah tangga pada kelompok transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya yang turun menjadi minus 4,80 persen di tahun 2020, kemudian tumbuh menjadi 4,23 persen tahun 2021, sedangkan tahun 2022 dan 2023 kembali tumbuh positif masing-masing 7,31 persen dan 4,98 persen. Dan pada tahun 2024 tumbuh 7,23 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan 'riil' ini menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke waktu. Informasi ini dapat menunjukkan terjadinya perubahan pola konsumsi

masyarakat sebagai respon terhadap kondisi perekonomian wilayah, kondisi demand-supply barang dan jasa, kemudahan akses terhadap komoditi dalam perekonomian, hingga tingkat kemakmuran masyarakat yang sedang terjadi, meskipun mungkin hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu.

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam tabel 9, menunjukan perubahan harga pada setiap tahunnya untuk setiap kelompok konsumsi.

Tabel 9 Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga di Provinsi Banten (persen), 2020–2024

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	1,27	2,92	9,35	2,21	4,26
b. Pakaian dan Alas Kaki	2,63	2,22	3,77	3,56	3,80
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	1,48	1,30	4,17	3,99	2,63
d. Kesehatan & Pendidikan	1,13	1,07	2,66	1,97	1,67
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	-0,12	0,51	7,34	3,35	4,86
f. Hotel & Restoran	2,11	2,10	2,98	2,14	2,51
g. Lainnya	7,08	1,75	4,44	4,37	4,12
Total Konsumsi Rumah Tangga	1,38	1,73	6,46	2,89	3,80

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Pada Periode tahun 2020 s.d 2024 peningkatan harga (inflasi) relatif stabil, akan tetapi pertumbuhan harga relatif tinggi terjadi pada tahun 2022. Rincian peningkatan harga pada kelompok makanan, minuman, dan rokok sebesar 1,27 persen (2020); 2,92 persen (2021); 9,35 persen (2022); 2,21 persen (2023) dan 4,26 persen pada tahun 2024. Dari informasi tabel di atas terlihat gejolak perubahan harga lebih sering terjadi pada komoditi barang dan jasa tersier, terutama yang penentuan harganya diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar yang berlaku.

3.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Konsumsi akhir Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LN PRT) peranannya dalam PDRB menurut pengeluaran sangat kecil dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah semestinya dapat lebih ditingkatkan lagi. Data berikut menunjukkan hal tersebut, dimana tabel tersebut dapat dilihat proporsinya terhadap PDRB Banten yang tidak pernah lebih dari 1 persen selama periode tahun 2020–2024.

Tabel 10 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit (LN PRT) di Provinsi Banten, 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (miliar Rp)	2.922,92	3.015,58	3.192,70	3.451,65	4.074,35
b. ADHK 2010 (miliar Rp)	2.117,52	2.080,87	2.122,44	2.199,21	2.503,14
Proporsi terhadap PDRB (%) ADHB)	0,47	0,45	0,43	0,42	0,47

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lembaga Non-Profit yang melayani rumah tangga di provinsi Banten didominasi oleh lembaga keagamaan dan sosial masyarakat, seperti pondok pesantren salafiah, yayasan sosial, dan ormas kedaerahan. Dengan corak organisasi seperti itu, aktifitas sosialnya secara ekonomi terbilang kecil dibanding aktifitas ekonomi kelas multinasional yang beroperasi di Banten. Walaupun demikian peran lembaga ini dalam perekonomian Banten tidak bisa begitu saja dikesampingkan, mengingat lembaga-lembaga ini punya akar masa dan pengaruh yang kuat di masyarakat dan telah berlangsung lama.

Kondisi tersebut terlihat dari kontribusi konsumsi LNPRT terhadap PDRB Banten yang relatif tetap pada kisaran kurang dari 0,5 persen. Informasi ini juga menggambarkan aktifitas LNPRT dalam kegiatan sosial ekonomi masyarakat relatif sama, terjadwal atau musiman, dan telah menjadi agenda rutin dari tahun ke tahun, seperti perayaan hari besar keagamaan.

3.4 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian provinsi Banten serta bagaimana perkembangannya akan dijelaskan dalam uraian berikut ini.

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik untuk adh Berlaku maupun adh Konstan 2010. Pada tahun 2020 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah adh berlaku sebesar 27.388,52 miliar rupiah, kemudian meningkat pada tahun 2021 mencapai 29.156,76 miliar rupiah, kemudian meningkat kembali pada tahun 2022 nilainya mencapai 30.623,92 miliar rupiah. Kemudian pada tahun 2023 dan 2024 nilainya terus meningkat mencapai 33.171,72 miliar rupiah dan 37.084,34 miliar rupiah.

Tabel 11 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah di Provinsi Banten, 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (miliar Rp)	27.388,52	29.156,76	30.623,92	33.171,72	37.084,34
b. ADHK 2010 (miliar Rp)	17.758,86	17.935,26	17.973,92	17.985,86	18.775,23
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	4,38	4,38	4,10	4,07	4,24
Konsumsi Pemerintah perkapita (ribu Rp)					
a. ADHB	2307,38	2425,09	2516,96	2695,19	2983,12
b. ADHK 2010	1496,12	1491,75	1477,26	1461,35	1510,31
Pertumbuhan					
a. Total konsumsi Pemerintah	-9,51	0,99	0,22	0,07	4,39

Catatan: * Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara

Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah adh konstan 2010, setelah terjadi penurunan di tahun 2020, untuk tahun-tahun selanjutnya sampai dengan 2024 selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB mengalami pasang surut sebagai respon dari perubahan tata laksana pemerintah. Selama periode 2020–2024 porsi konsumsi pemerintah tidak lebih dari 5 persen dari total PDRB Banten. Sepanjang periode tersebut, proporsi terendah terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 4,07 persen; sedangkan proporsi tertinggi pada tahun 2020 dan 2021 yang mencapai 4,38 persen. Penurunan tersebut cenderung didominasi oleh pengeluaran pemerintah untuk konsumsi kolektif.

Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung.

Adanya moratorium PNS, berbagai kebijakan efisiensi belanja pemerintah, pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, serta perubahan nilai belanja pegawai Pemerintah Daerah, *refocusing* anggaran saat pandemi Covid-19 merupakan beberapa faktor terjadinya perubahan pola konsumsi pemerintah.

3.5 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)¹.

¹Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun ekspor

Tabel 12 Perkembangan dan Struktur PMTB Provinsi Banten, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (miliar Rp)	219.704,08	235.747,73	257.257,52	279.576,27	296.123,77
b. ADHK 2010 (miliar Rp)	143.572,83	149.908,85	155.430,59	160.769,56	164.999,07
Proporsi terhadap PDRB (%) ADHB	35,10	35,40	34,43	34,34	33,90
Struktur PMTB¹					
a. Bangunan (miliar Rp)	149.316,42	161.733,51	176.609,90	187.927,53	194.714,50
Persen (%)	67,96	68,60	68,65	67,22	65,75
b. Non Bangunan (miliar Rp)	70.387,66	74.014,22	80.647,62	91.648,74	101.409,27
Persen (%)	32,04	31,40	31,35	32,78	34,25
Total PMTB (miliar Rp)	219.704,08	235.747,73	257.257,52	279.576,27	296.123,77
Persen (%)	100	100	100	100	100
Pertumbuhan²(%)					
a. Bangunan	-0,63	5,08	3,89	0,96	1,46
b. Non Bangunan	1,22	2,93	3,22	9,13	5,13
Total PMTB	-0,07	4,41	3,68	3,43	2,63

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

¹ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku / ADHB)

² Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan / ADHK 2010)

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah), PMTB juga menunjukkan fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Selama periode 2020-2024, nilai PMTB mengalami peningkatan baik secara nominal maupun riil. Data pada tabel 12 menjelaskan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan PMTB relatif meningkat dari minus 0,07 persen (2020), tapi kemudian tahun 2021 masa pemulihan Covid-19 meningkat menjadi 4,41 persen dan selanjutnya melambat 3,68 persen

(2022), dan masing-masing menjadi 3,43 persen dan 2,63 persen pada tahun 2023 dan 2024.

Pertumbuhan PMTB pada masing-masing komponen sangat bervariasi antar tahunnya. Sub komponen bangunan merupakan komponen dengan proporsi terbesar dalam pembentukan modal tetap. Pertumbuhan di sektor bangunan meskipun cenderung meningkat tetapi polanya relatif stabil bila dibandingkan dengan pertumbuhan sub komponen PMTB lainnya.

Proporsi non bangunan terhadap total PMTB relatif berfluktuasi selama periode 2020-2024 (tabel 12). Perubahan yang terjadi pada proporsi tersebut tidak lepas dari pengaruh pertumbuhan yang terjadi pada masing-masing sub komponen PMTB tersebut. Pertumbuhan "riil" sub komponen bangunan pada tahun 2020 sebesar -0,63 persen, kemudian meningkat menjadi sebesar 5,08 persen di tahun 2021 dan melambat menjadi 3,89 persen (2022). Kemudian pada tahun 2023 dan 2024 meningkat masing-masing menjadi 0,96 persen dan 1,46 persen.

Sub komponen non bangunan menunjukkan pola yang tidak jauh berbeda dengan bangunan. Pada tahun 2020 sub komponen non bangunan tumbuh sebesar 1,22 persen, kemudian mengalami peningkatan di tahun 2021 tumbuh menjadi sebesar 2,93 persen dan pada pemulihan pandemi Covid-19 meningkat menjadi 3,22 persen (2022). Kemudian pada tahun 2023 dan 2024 naik masing-masing menjadi 9,13 persen dan 5,13 persen.

Secara umum, selama kurun waktu tahun 2020-2024 pertumbuhan PMTB mengalami peningkatan di mana pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 yang mencapai besaran 4,41 persen dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar -0,07 persen.

3.6 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “persediaan” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak dapat berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Tabel 13 Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori di Provinsi Banten, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (miliar Rp)	13,86	8,59	46,89	30,19	170,64
b. ADHK 2010 (miliar Rp)	13,36	6,87	36,38	21,52	116,92
Proporsi terhadap PDRB (%) ADHB)	~0	~0	0,01	~0	0,02

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan

komponen inventori tidak banyak dikaji lebih. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah, bahwa proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Pada Tahun 2020 perubahan inventori sebesar 13,86 miliar rupiah. Kemudian pada tahun 2021 menurun menjadi 8,59 miliar rupiah dan meningkat menjadi 46,89 miliar pada tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2023 menurun menjadi 30,19 miliar rupiah dan meningkat tajam menjadi 170,64 miliar rupiah pada tahun 2024.

3.7 PERKEMBANGAN EKSPOR LUAR NEGERI BARANG DAN JASA

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor luar negeri menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, tetapi dikonsumsi oleh pihak luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

Secara total, nilai ekspor luar negeri Banten selama periode tahun 2020-2024 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2020 nilai ekspor luar negeri Banten mencapai 161.078,95 miliar rupiah, kemudian terjadi peningkatan pada tahun 2021 menjadi 201.111,67 miliar rupiah. Pada tahun 2022 meningkat menjadi 225.168,67 miliar rupiah, kemudian pada tahun 2023 turun menjadi 191.080,14 miliar rupiah. Sedangkan pada tahun 2024 terjadi peningkatan kembali menjadi 196.933,52 miliar rupiah.

Sejalan dengan nilai ekspor adh berlaku, nilai ekspor adh konstan 2010 juga menunjukkan kecenderungan meningkat dengan nilai riil sebesar 114.223,40 miliar rupiah pada tahun 2020, kemudian pada tahun 2021

meningkat menjadi 133.588,83 miliar rupiah. Pada tahun 2022 kembali meningkat menjadi 141.451,73 miliar rupiah dan menurun menjadi 122.323,77 miliar rupiah pada tahun 2023. Sedangkan pada tahun 2024 sedikit mengalami peningkatan menjadi sebesar 125.141,69 miliar rupiah.

Selama kurun waktu 2020–2024, meskipun secara nominal nilai ekspor luar negeri mengalami peningkatan, tetapi proporsinya dalam PDRB relatif berfluktuasi, yaitu dari 25,74 persen pada tahun 2020; 30,20 persen (2021); 30,13 persen (2022), 23,47 persen (2023) dan pada tahun 2024 menurun menjadi 22,54 persen.

Tabel 14 Perkembangan Ekspor Luar Negeri Barang dan Jasa di Provinsi Banten, 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor LN					
a. ADHB (miliar Rp)	161.078,95	201.111,67	225.168,67	191.080,14	196.933,52
b. ADHK 2010 (miliar Rp)	114.223,21	133.588,83	141.451,73	122.323,77	125.141,69
Proporsi terhadap PDRB (%) ADHB)	25,74	30,20	30,13	23,47	22,54

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Menurut komposisinya, sebagian besar ekspor luar negeri Banten berupa barang (rata-rata 99 persen) seperti komoditi alas kaki, produk tembaga, kertas, plastik, dan kimia organik. Sisanya adalah ekspor dalam bentuk jasa. Pertumbuhan riil total ekspor luar negeri mencapai angka yang cukup tinggi, khususnya pada tahun 2021 sebesar 16,95 persen. Sementara itu pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2023 yakni sebesar -13,52 persen. Hal ini terjadi disebabkan karena adanya penurunan permintaan terhadap komoditi utama ekspor luar negeri Banten seperti produk alas kaki, plastik dan barang dari plastik, kabel tembaga, besi dan baja, serta produk barang dari karet.

3.8 PERKEMBANGAN IMPOR LUAR NEGERI BARANG DAN JASA

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Banten. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangkan nilai PDRB menurut pengeluaran dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor luar negeri, transaksi impor luar negeri menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor luar negeri terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongannya bisa berbeda dengan ekspor.

Tabel 15 Perkembangan Impor Luar Negeri Barang dan Jasa di Provinsi Banten, 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Impor LN					
a. ADHB (miliar Rp)	365.673,99	513.429,54	568.106,46	541.769,11	618.080,70
b. ADHK 2010 (miliar Rp)	231.421,54	249.954,45	254.019,93	239.328,31	268.504,57
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	58,42	77,11	76,03	66,55	70,75

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor luar negeri menunjukkan semakin kuatnya ketergantungan Banten terhadap ekonomi atau produk negara lain. Komponen impor luar negeri

termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Banten di luar negeri, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa).

Tabel 15 di atas menunjukkan bahwa Nilai impor Banten tahun 2020 sebesar 365.673,99 miliar rupiah, kemudian pada tahun 2021 meningkat mencapai 513.429,54 miliar rupiah. Pada tahun 2022 dan 2023 Nilai impor Banten meningkat masing-masing mencapai 568.106,56 miliar rupiah dan 541.769,17 miliar rupiah, sedangkan pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 618.080,70 miliar rupiah. Dari sisi lain, proporsi impor luar negeri terhadap total PDRB Banten memiliki kecenderungan bertambah dengan porsi terbesar pada tahun 2021 yaitu sebesar 77,11 persen dan porsi terendah pada tahun 2020 yaitu sebesar 58,42 persen.

Menurut komposisinya, sebagian besar produk impor berbentuk barang yang memiliki porsi rata-rata sekitar 96,04 persen, sedangkan sisanya sebesar 3,96 persen dalam bentuk impor jasa. Selama periode 2020-2024 tersebut, impor LN dalam bentuk barang maupun jasa cenderung mempunyai pola struktur yang stabil.

3.9 PERKEMBANGAN NET EKSPOR ANTAR DAERAH

Net ekspor antar daerah didefinisikan sebagai ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah. Berbeda dengan penghitungan ekspor-impor barang dan jasa luar negeri, pada penghitungan ekspor-impor antar daerah tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut. Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor-impor antar provinsi menjadikan komponen ini (dalam series PDRB adh Konstan 2010) diperlakukan sebagai item penyeimbang perbedaan antara total PDRB menurut pengeluaran dengan total PDRB menurut lapangan usaha. Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung.

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu: ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antar daerah juga hasilnya dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda “positif” berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar dari pada impor antar daserah, demikian pula sebaliknya. Pada saat ini untuk memisahkan net ekspor antar daerah menjadi nilai ekspor antar daerah dan nilai impor antar daerah dilakukan dengan metode tidak langsung, yaitu dengan metode *cross hauling*.

Tabel 16 Perkembangan Net Ekspor Antar Daerah di Provinsi Banten, 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Net Ekspor Antar Daerah					
a. ADHB (miliar Rp)	234.600,16	349.957,64	399.694,40	421.431,49	492.506,81
b. ADHK 2010 (miliar Rp)	140.043,08	146.429,51	149.451,76	161.024,68	192.620,24
Proporsi terhadap PDRB (%) ADHB)	37,48	52,56	53,49	51,77	56,38

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) setiap komoditas di suatu perekonomian. Penghitung ekspor impor dengan metode cross-hauling diawali dengan metode *commodity balance*. Metode *commodity balance* adalah metode penghitungan ekspor-impor dengan memanfaatkan Tabel Input-Output.

BAB 4

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT PENGELUARAN PROVINSI BANTEN 2020-2024

4 PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT PENGELOUARAN

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PDRB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (NOMINAL)

Bidang ketenagakerjaan adalah bagian dari upaya pengembangan Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran produktivitas, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan produksi (nilai tambah), pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDRB per kapita.

PDRB per kapita Provinsi Banten menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (tabel 17), seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Banten rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai per kapita di masing-masing tahun tersebut.

Tabel 17 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB per Kapita Provinsi Banten, 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (miliar Rp)					
- ADHB	625.895,38	665.870,30	747.220,84	814.122,03	873.626,25
-ADHK 2010	441.148,58	460.952,79	484.129,42	507.425,74	531.735,25
PDRB per kapita (ribu Rp)					
- ADHB	52.729,40	55.383,29	61.413,54	66.147,20	70.275,82
-ADHK 2010	37.165,16	38.339,42	39.790,24	41.228,21	42.773,59
Pertumbuhan PDRB per kapita ADHK 2010	3,48	3,16	3,78	3,61	3,75

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Secara absolut, baik PDRB ADHB dan ADHK pada periode 2020–2024 menunjukkan tren meningkat. Hal ini juga terjadi pada PDRB per kapita mengalami peningkatan selama periode 2021–2024 baik secara nominal (ADHB) dan riil (ADHK). PDRB nominal per kapita pada tahun 2024 mencapai Rp70,28 juta naik dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp66,15 juta. Selain itu, PDRB riil per kapita juga kembali mengalami peningkatan dari tahun 2023 yang sebesar Rp41,23 juta hingga mencapai Rp42,77 juta pada tahun 2024.

Laju pertumbuhan PDRB riil per kapita pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 3,75 persen dibandingkan tahun 2023. Ini menandakan bahwa perbaikan ekonomi paska pandemi COVID-19 terus berlanjut. Hal ini ditandai meningkatnya permintaan domestik dan luar negeri.

4.2 PERBANDINGAN PENGELOUARAN PDRB UNTUK KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP EKSPOR

Selama ini konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi yang sangat dominan dalam PDRB Banten (rata-rata 53 persen), yang artinya bahwa seluruh produk yang dipasarkan di wilayah Banten sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Di dalamnya termasuk pula produk yang berasal dari impor.

Tabel 18 Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap Eksport, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (miliar Rp)	345.860,88	360.301,87	399.343,21	427.149,69	464.813,53
Total Eksport (ADHB) (miliar Rp)	472.464,08	636.155,22	787.175,98	843.331,33	946.002,27
Rasio Konsumsi RT terhadap Eksport	0,73	0,57	0,51	0,51	0,49

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Berdasarkan tabel 18 diperoleh informasi bahwa rasio konsumsi rumah tangga terhadap eksport adalah kurang dari satu, pada periode 2020-2024. Ini berarti bahwa sebagian penyediaan (*supply*) domestik tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga, sehingga kebutuhan konsumsi domestik Provinsi Banten harus dipenuhi melalui impor. Penurunan rasio yang terjadi pada beberapa tahun lebih disebabkan karena eksport bertambah lebih besar dari kenaikan konsumsi rumah tangga. Dari hal tersebut diperoleh hasil bahwa rasio konsumsi rumah tangga terhadap total eksport turun menjadi 0,49 dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai rasio di kisaran 0,51 - 0,73.

4.3 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio konsumsi akhir rumah tangga terhadap PMTB merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Sekilas nampak bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah domestik Banten digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

Rasio konsumsi rumah tangga terhadap pembentukan modal tetap bruto (PMTB) selama periode 2020–2024 cenderung melambat dari sebesar 1,57 pada tahun 2020 menjadi 1,53 di tahun 2023 dan kembali meningkat menjadi 1,57 di tahun 2024. Perkembangan seperti ini sesuai dengan harapan, dimana output ekonomi sebelumnya dapat menambah kapasitas ekonomi berikutnya melalui peningkatan investasi fisik.

Tabel 19 Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga Terhadap PMTB, 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (miliar Rp)	345.860,88	360.301,87	399.343,21	427.149,69	464.813,53
Total PMTB (ADHB) (miliar Rp)	219.704,08	235.747,73	257.257,52	279.576,27	296.123,77
Rasio Konsumsi RT terhadap PMTB	1,57	1,53	1,55	1,53	1,57

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

4.4 PROPORSI KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PDRB

Konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk konsumsi akhir.

Tabel 20 Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB Provinsi Banten, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (miliar Rp)					
a. Rumah tangga	345.860,88	360.301,87	399.343,21	427.149,69	464.813,53
b. LNPRT	2.922,92	3.015,58	3.192,70	3.451,65	4.074,35
c. Pemerintah	27.388,52	29.156,76	30.623,92	33.171,72	37.084,34
Jumlah	376.172,33	392.474,21	433.159,83	463.773,05	505.972,22
PDRB (ADHB) (milliar Rp)	625.895,38	665.870,30	747.220,84	814.122,03	873.626,25
Proporsi konsumsi akhir terhadap PDRB (ADHB)	60,10	58,94	57,97	56,97	57,92

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sebagian besar barang dan jasa yang dipasarkan di wilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (lebih dari 50 persen). Periode 2020-2024, proporsi konsumsi akhir terhadap PDRB menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2024, nilai konsumsi akhir mengalami peningkatan, begitu juga secara proporsi terhadap PDRB mengalami peningkatan menjadi 57,92 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar 56,97 persen.

4.5 PERBANDINGAN EKSPOR LUAR NEGERI TERHADAP PMTB

Ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik, tetapi diperdagangkan ke luar negeri. Untuk menghasilkan produk yang diekspor kemungkinan besar menggunakan kapital (PMTB). Sementara itu, sebagian barang yang diekspor bisa pula berupa barang kapital. Rasio ekspor terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor dengan nilai produk yang menjadi kapital (PMTB).

Tabel 21 Rasio Ekspor Luar Negeri Terhadap PMTB (ADHB) Provinsi Banten, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ekspor Luar Negeri (ADHB) (miliar Rp)	161.078,95	201.111,67	225.168,67	191.080,14	196.933,52
Total PMTB (ADHB) (miliar Rp)	219.704,08	235.747,73	257.257,52	279.576,27	296.123,77
Rasio Ekspor LN terhadap PMTB	0,73	0,85	0,88	0,68	0,67

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Selama tahun 2020-2024 ekspor luar negeri Banten mempunyai nilai yang lebih rendah dari PMTB (tabel 21). Untuk menghasilkan seluruh produk domestik (termasuk ekspor) disyaratkan tersedianya sejumlah kapital (yang di dalamnya termasuk pula kapital impor). Rasio ekspor luar negeri terhadap PMTB pada tahun 2024 mengalami sedikit penurunan menjadi 0,67 dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 0,68. Penurunan rasio tersebut di antaranya disebabkan oleh kenaikan PMTB yang relatif lebih pesat dibandingkan dengan kenaikan ekspor.

4.6 PERBANDINGAN PDRB TERHADAP TOTAL IMPOR

Rasio PDRB terhadap total impor ini memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor. Selain itu, indikator menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan oleh wilayah lain. Jika nilai rasio ini semakin rendah, maka Provinsi Banten memiliki ketergantungan impor yang semakin tinggi. Dan sebaliknya, jika nilai rasio PDRB terhadap impor semakin besar, maka Provinsi Banten memiliki ketergantungan impor yang semakin rendah.

Tabel 22 Rasio PDRB Terhadap Impor Provinsi Banten, 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHB) (miliar Rp)	625.895,38	665.870,30	747.220,84	814.122,03	873.626,25
Total Impor (ADHB) (miliar Rp)	442.458,96	598.515,45	730.419,38	772.588,82	874.642,65
Rasio PDRB terhadap Total Impor	1,41	1,11	1,02	1,05	1,00

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Rasio PDRB terhadap total impor pada periode 2020–2024 menunjukkan penurunan dari 1,41 (2020) menjadi 1,00 (2024). Rasio PDRB terhadap impor Provinsi Banten terlihat masih relatif kecil yang menunjukkan ketergantungan perekonomian Banten terhadap impor masih cukup tinggi. Adanya penurunan rasio pada tahun 2024, seharusnya dapat menjadi indikator keberhasilan dari upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk impor tersebut. Hal ini sejalan dengan meningkatnya kinerja ekspor sebagai upaya perbaikan ekonomi sejak mengalami pandemi COVID-19 sejak maret 2020.

4.7 KESEIMBANGAN TOTAL PENYEDIAAN DAN TOTAL PERMINTAAN

Ketergantungan ekonomi suatu daerah oleh produk yang berasal dari impor. Ketergantungan (ketidakseimbangan) tersebut dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*).

Berdasarkan tabel 23 diperoleh informasi bahwa untuk memenuhi permintaan akhir domestik, dengan kisaran 50 persen produk masih harus didatangkan dari luar wilayah Provinsi Banten (termasuk luar negeri). Dengan kata lain, kebutuhan domestik Provinsi Banten baru bisa dipenuhi sekitar 50 persen dari selisih hasil produksi domestik. Permintaan akhir yang menunjukkan penurunan akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020, tetapi di tahun 2024 sudah menunjukkan adanya peningkatan tendensi permintaan (akhir) masyarakat hingga menjadi 1.748.268,90 miliar rupiah dibandingkan pada tahun 2020 yang sebesar 1.068.354,34 miliar rupiah.

Tabel 23 Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Provinsi Banten, 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<u>Total Penyediaan</u>					
PDRB (ADHB) (%)	625.895,38 (58,58)	665.870,30 (52,66)	747.220,84 (50,57)	814.122,03 (51,31)	873.626,25 (49,97)
Total Impor (ADHB) (%)	442.458,96 (41,42)	598.515,45 (47,34)	730.419,38 (49,43)	772.588,82 (48,69)	874.642,65 (50,03)
Total Permintaan Akhir (%)	1.068.354,34 (100,00)	1.264.385,75 (100,00)	1.477.640,22 (100,00)	1.586.710,85 (100,00)	1.748.268,90 (100,00)

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Di sisi lain, "penyediaan" produk barang dan jasa (tercermin dalam PDRB) yang mampu dihasilkan oleh ekonomi domestik Provinsi Banten masing-masing sebesar Rp625.895,38 miliar di tahun 2020, Rp665.870,30 miliar di tahun 2021, Rp747.220,84 miliar di tahun 2022, Rp814.122,03 miliar di tahun 2023, dan Rp873.626,25 miliar di tahun 2024.

Karena produk domestik tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhan permintaan, maka berbagai produk barang dan jasa diimpor, dengan nilai masing-masing sebesar Rp442.458,96 miliar di tahun 2020, Rp598.515,45 miliar di tahun 2021, Rp730.419,38 miliar di tahun 2022, dan Rp 772.588,82 miliar di tahun 2023, dan Rp 874.642,65 miliar di tahun 2024.

4.8 NERACA PERDAGANGAN (TRADE BALANCE)

Transaksi devisa yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar negeri (non-residen) dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai "Ekspor Neto", apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus, dan sebaliknya yang terjadi adalah defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran devisa masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran devisa keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut.

Selain gambaran posisi neraca perdagangan, dapat juga dilihat perbandingan (rasio) antara nilai total ekspor terhadap total impor, meskipun hanya berlaku secara total. Namun rasio tersebut tidak dapat merefleksikan perbandingan menurut jenis komoditas, harga maupun kuantum. Apabila rasio lebih besar dari 1 (satu), maka nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor. Dan sebaliknya, apabila rasio kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih tinggi dari pada nilai ekspor. Besar kecilnya ekspor atau impor suatu wilayah sangat tergantung kepada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya.

Selama periode 2020-2024, posisi perdagangan barang dan jasa provinsi Banten dengan luar negeri dan antar provinsi, selalu menunjukkan nilai positif.

Hal ini menunjukkan neraca perdagangan barang dan jasa provinsi Banten selalu dalam posisi surplus. Nilai total ekspor yang lebih besar dari total impor menyebabkan adanya aliran devisa masuk.

Tabel 24 Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Provinsi Banten, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Ekspor (ADHB) (miliar Rp)	472.464,08	636.155,22	787.175,98	843.331,33	946.002,27
Total Impor (ADHB) (miliar Rp)	442.458,96	598.515,45	730.419,38	772.588,82	874.642,65
Net ekspor (X - M) (miliar Rp)	30.005,12	37.639,77	56.756,60	70.742,52	71.359,62
Rasio ekspor terhadap Impor	1,07	1,06	1,08	1,09	1,08

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Total surplus perdagangan Provinsi Banten yang terjadi pada periode 2020-2024 mengalami peningkatan. Surplus perdagangan di tahun 2020 sebesar 30.005,12 miliar rupiah dan mengalami peningkatan menjadi 71.359,62 miliar rupiah pada tahun 2024. Jadi bisa dikatakan Banten selalu mengalami surplus perdagangan. Namun apabila dilihat hanya pada neraca perdagangan luar negeri saja, maka Banten sepanjang 2020-2024 selalu mengalami defisit perdagangan luar negeri.

Sementara rasio total ekspor terhadap total impor cenderung stabil dari tahun 2020–2024. Pada tahun 2020 rasio nya sebesar 1,07 sampai pada tahun 2024 tidak terlalu jauh perbedaannya, dimana rasio berada pada 1,08.

4.9 RASIO PERDAGANGAN INTERNASIONAL (RPI)

Rasio perdagangan internasional menunjukkan perbandingan aktivitas perdagangan internasional dari suatu wilayah, apakah didominasi oleh ekspor luar negeri (LN) atau impor luar negeri (LN). Formulasinya diperoleh dengan menghitung selisih antara ekspor LN dikurangi impor LN dibagi dengan jumlah ekspor LN dan impor LN. Koefisien RPI berkisar antara -1 s.d + 1 (- 1 < RPI < +1). Jika RPI berkisar antara minus 1, maka perdagangan internasional didominasi oleh impor, sedangkan apabila berkisar antara positif 1, maka perdagangan internasional didominasi oleh transaksi ekspor.

Tabel 25 Rasio Perdagangan Internasional Provinsi Banten, 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor LN, ADHB (X)	161.078,95	201.111,67	225.168,67	191.080,14	196.933,52
Nilai Impor LN, ADHB (M)	365.673,99	513.429,54	568.106,46	541.769,11	618.080,70
(X-M)	-204.595,04	-312.317,87	-342.937,80	-350.688,97	-421.147,18
(X+M)	526.752,94	714.541,21	793.275,13	732.849,25	815.014,22
RPI	-0,39	-0,44	-0,43	-0,48	-0,52

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 25 memberikan informasi bahwa pada periode tahun 2020–2024, posisi ekspor luar negeri (LN) selalu lebih rendah dari impor luar negeri (LN). Kecenderungan nilai ekspor pada periode tersebut berfluktuasi dari 161.078,95 miliar rupiah pada tahun 2020 hingga mencapai 196.933,52 miliar rupiah pada tahun 2024.

Namun demikian, kecenderungan impor luar negeri Banten juga mempunya pola naik turun yang hampir sama. Rasio Perdagangan Internasional (RPI) Provinsi Banten pada periode 2020 – 2024 menunjukkan nilai negatif. Ini mengindikasikan bahwa perdagangan internasionalnya selalu didominasi oleh kegiatan impor karena rasio yang menunjukkan tanda negatif.

4.10 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter Nilai Tambah.

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Formula :

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Dimana I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

Tabel 26 Incremental Capital Output Ratio Provinsi Banten, 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010) (miliar Rp)	441.148,58	460.952,79	484.129,42	507.425,74	531.735,25
Perubahan (miliar Rp)	-15.471,46	19.804,21	23.176,64	23.296,32	24.309,51
PMTB (ADHK 2010) (miliar Rp)	143.572,83	149.908,85	155.430,59	160.769,56	164.999,07
ICOR	-9,28	7,57	6,71	6,90	6,79

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2021-2024 ICOR Banten kembali positif setelah mengalami pandemi COVID-19 sejak Maret 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan investasi untuk meningkatkan output di Banten menjadi semakin besar. Pada tahun 2024 akhirnya ICOR Banten mencapai 6,79. Dari besaran ICOR 2024 sebesar 6,79 tersebut, dapat dikatakan bahwa di Provinsi Banten untuk setiap peningkatan output sebesar 1 miliar rupiah diperlukan penambahan kapital sebesar 6,79 miliar rupiah.

BAB 5

PENUTUP

5 PENUTUP

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2020-2024 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi provinsi Banten pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri serta perdagangan antar daerah. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, dan rumah tangga), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2020 s.d 2024, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan

disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE), dan bahkan Neraca Arus Dana.

5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar negeri (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Provinsi Banten terhadap ekonomi negara dan wilayah lain (*rest of the world*).

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.

_____, *Statistik Industri*, berbagai seri, Jakarta.

_____, *Statistik Listrik, Gas dan Air*, berbagai seri, Jakarta.

_____, *Statistik Keuangan BUMN dan BUMD*, 1997, Jakarta 2000.

_____, *Profil Ekonomi Rumahtangga 1998*, Jakarta 1999.

Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, *Tabel Input Output Provinsi Banten Tahun 2016, 2021*, Serang.

_____, *Pemetaan Potensi Investasi Sektor Pertanian di Provinsi Banten, 2014*, Serang.

Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC, 1979.

Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Banten*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.

_____, *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.

_____, *Handbook of National Accounting for Production, Sources and Methods*, Series F No. 39, New York, 1986.

_____, *Handbook of National Accounting, Public Sector Accounts, Studies Methods*, Series F No. 50, New York, 1988.

_____, *Link between Business Accounting and National Accounting, Public Sector Accounts, Studies Methods*, Series F No. 76, New York, 2000.

Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.

World Bank, *System of National Accounts 2008*, Bahan Kursus, Washington DC, 2008

LAMPIRAN

Lampiran 1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran di Provinsi Banten, 2020–2024

(juta rupiah)

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g)	345.860.881	360.301.873	399.343.213	427.149.685	464.813.526
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	115.896.894	122.627.895	139.928.812	148.633.879	162.539.182
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	14.924.434	15.151.072	16.226.180	17.060.050	17.908.918
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	56.867.252	58.274.232	60.631.072	65.322.411	69.342.333
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	26.816.974	27.543.525	28.672.091	30.070.308	31.572.440
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	83.825.843	87.817.632	101.146.179	109.741.426	123.397.376
1.f. Hotel dan Restoran	30.630.901	31.704.685	34.606.765	36.928.164	39.366.468
1.g. Lainnya	16.898.583	17.182.832	18.132.113	19.393.448	20.686.808
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	2.922.919	3.015.585	3.192.698	3.451.645	4.074.351
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	27.388.524	29.156.757	30.623.922	33.171.717	37.084.342
3.a. Konsumsi Kolektif	14.346.441	15.263.531	15.975.681	17.302.703	19.624.657
3.b. Konsumsi Individu	13.042.083	13.893.226	14.648.241	15.869.013	17.459.684
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	219.704.078	235.747.733	257.257.518	279.576.274	296.123.769
4.a. Bangunan	149.316.417	161.733.510	176.609.903	187.927.532	194.714.497
4.b. Non-Bangunan	70.387.661	74.014.223	80.647.616	91.648.742	101.409.273
5. Perubahan Inventori	13.861	8.589	46.887	30.195	170.639
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	161.078.951	201.111.670	225.168.667	191.080.141	196.933.522
6.a. Barang	159.848.838	199.474.431	223.150.594	188.799.215	194.363.553
6.b. Jasa	1.230.113	1.637.239	2.018.073	2.280.925	2.569.968
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	365.673.988	513.429.542	568.106.463	541.769.114	618.080.702
7.a. Barang	356.186.692	498.229.241	546.129.880	514.072.646	585.641.507
7.b. Jasa	9.487.295	15.200.301	21.976.583	27.696.468	32.439.195
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	234.600.157	349.957.639	399.694.396	421.431.490	492.506.805
8.a. Ekspor	311.385.129	435.043.546	562.007.316	652.251.192	749.068.748
8.b. Impor	76.784.972	85.085.907	162.312.921	230.819.702	256.561.943
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	625.895.384	665.870.305	747.220.837	814.122.033	873.626.252

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran di Provinsi Banten, 2020–2024

Komponen Pengeluaran						(juta rupiah)
	2020 (1)	2021 (2)	2022 (3)	2023* (4)	2024** (5)	
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g)	254.841.256	260.957.054	271.682.542	282.429.448	296.083.526	
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	86.769.422	89.199.902	93.081.580	96.734.770	101.458.737	
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	11.380.841	11.302.382	11.664.605	11.842.675	11.976.890	
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	41.071.371	41.546.050	41.494.417	42.991.103	44.465.907	
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	18.919.999	19.227.324	19.496.338	20.052.615	20.709.195	
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	63.877.959	66.577.204	71.440.894	74.997.404	80.419.614	
1.f. Hotel dan Restoran	21.044.498	21.334.389	22.612.947	23.624.317	24.568.614	
1.g. Lainnya	11.777.167	11.769.803	11.891.762	12.186.565	12.484.569	
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	2.117.523	2.080.868	2.122.444	2.199.210	2.503.142	
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	17.758.863	17.935.265	17.973.917	17.985.859	18.775.234	
3.a. Konsumsi Kolektif	8.937.527	9.040.378	9.076.527	9.082.761	9.622.485	
3.b. Konsumsi Individu	8.821.336	8.894.887	8.897.389	8.903.098	9.152.749	
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	143.572.830	149.908.846	155.430.585	160.769.561	164.999.065	
4.a. Bangunan	99.291.856	104.331.677	108.387.811	109.433.275	111.030.449	
4.b. Non-Bangunan	44.280.974	45.577.169	47.042.774	51.336.285	53.968.616	
5. Perubahan Inventori	13.356	6.867	36.382	21.518	116.920	
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	114.223.209	133.588.826	141.451.726	122.323.774	125.141.692	
6.a. Barang	113.486.790	132.815.942	140.653.856	121.499.932	124.255.047	
6.b. Jasa	736.418	772.884	797.870	823.842	886.645	
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	231.421.537	249.954.449	254.019.930	239.328.309	268.504.569	
7.a. Barang	226.460.656	244.756.266	248.650.442	233.573.182	262.169.208	
7.b. Jasa	4.960.880	5.198.183	5.369.488	5.755.127	6.335.362	
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	140.043.078	146.429.509	149.451.756	161.024.676	192.620.237	
8.a. Ekspor	204.671.057	217.640.062	238.276.665	261.974.358	293.982.377	
8.b. Impor	64.627.979	71.210.553	88.824.909	100.949.682	101.362.139	
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	441.148.577	460.952.786	484.129.421	507.425.736	531.735.248	

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 3 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran di Provinsi Banten, 2020–2024

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g)	55,26	54,11	53,44	52,47	53,21
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	18,52	18,42	18,73	18,26	18,61
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	2,38	2,28	2,17	2,10	2,05
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	9,09	8,75	8,11	8,02	7,94
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	4,28	4,14	3,84	3,69	3,61
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	13,39	13,19	13,54	13,48	14,12
1.f. Hotel dan Restoran	4,89	4,76	4,63	4,54	4,51
1.g. Lainnya	2,70	2,58	2,43	2,38	2,37
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,47	0,45	0,43	0,42	0,47
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	4,38	4,38	4,10	4,07	4,24
3.a. Konsumsi Kolektif	2,29	2,29	2,14	2,13	2,25
3.b. Konsumsi Individu	2,08	2,09	1,96	1,95	2,00
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	35,10	35,40	34,43	34,34	33,90
4.a. Bangunan	23,86	24,29	23,64	23,08	22,29
4.b. Non-Bangunan	11,25	11,12	10,79	11,26	11,61
5. Perubahan Inventori	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	25,74	30,20	30,13	23,47	22,54
6.a. Barang	25,54	29,96	29,86	23,19	22,25
6.b. Jasa	0,20	0,25	0,27	0,28	0,29
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	58,42	77,11	76,03	66,55	70,75
7.a. Barang	56,91	74,82	73,09	63,14	67,04
7.b. Jasa	1,52	2,28	2,94	3,40	3,71
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	37,48	52,56	53,49	51,77	56,38
8.a. Ekspor	49,75	65,33	75,21	80,12	85,74
8.b. Impor	12,27	12,78	21,72	28,35	29,37
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan: * Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara

Lampiran 4 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Konstan 2010 Menurut Pengeluaran di Provinsi Banten, 2020–2024

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g)	57,77	56,61	56,12	55,66	55,68
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	19,67	19,35	19,23	19,06	19,08
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	2,58	2,45	2,41	2,33	2,25
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	9,31	9,01	8,57	8,47	8,36
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	4,29	4,17	4,03	3,95	3,89
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	14,48	14,44	14,76	14,78	15,12
1.f. Hotel dan Restoran	4,77	4,63	4,67	4,66	4,62
1.g. Lainnya	2,67	2,55	2,46	2,40	2,35
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,48	0,45	0,44	0,43	0,47
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	4,03	3,89	3,71	3,54	3,53
3.a. Konsumsi Kolektif	2,03	1,96	1,87	1,79	1,81
3.b. Konsumsi Individu	2,00	1,93	1,84	1,75	1,72
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	32,55	32,52	32,11	31,68	31,03
4.a. Bangunan	22,51	22,63	22,39	21,57	20,88
4.b. Non-Bangunan	10,04	9,89	9,72	10,12	10,15
5. Perubahan Inventori	–	–	0,01	–	0,02
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	25,89	28,98	29,22	24,11	23,53
6.a. Barang	25,73	28,81	29,05	23,94	23,37
6.b. Jasa	0,17	0,17	0,16	0,16	0,17
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	52,46	54,23	52,47	47,17	50,50
7.a. Barang	51,33	53,10	51,36	46,03	49,30
7.b. Jasa	1,12	1,13	1,11	1,13	1,19
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	31,75	31,77	30,87	31,73	36,22
8.a. Ekspor	46,40	47,22	49,22	51,63	55,29
8.b. Impor	14,65	15,45	18,35	19,89	19,06
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan: * Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara

Lampiran 5 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Berlaku Menurut Pengeluaran di Provinsi Banten, 2020–2024

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g)	-0,66	4,18	10,84	6,96	8,82
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	-1,61	5,81	14,11	6,22	9,36
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	4,06	1,52	7,10	5,14	4,98
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	4,87	2,47	4,04	7,74	6,15
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	1,71	2,71	4,10	4,88	5,00
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	-4,91	4,76	15,18	8,50	12,44
1.f. Hotel dan Restoran	-2,48	3,51	9,15	6,71	6,60
1.g. Lainnya	6,49	1,68	5,52	6,96	6,67
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-4,60	3,17	5,87	8,11	18,04
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	-7,92	6,46	5,03	8,32	11,80
3.a. Konsumsi Kolektif	-15,52	6,39	4,67	8,31	13,42
3.b. Konsumsi Individu	2,18	6,53	5,43	8,33	10,02
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	2,16	7,30	9,12	8,68	5,92
4.a. Bangunan	0,71	8,32	9,20	6,41	3,61
4.b. Non-Bangunan	5,38	5,15	8,96	13,64	10,65
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	-0,36	24,85	11,96	-15,14	3,06
6.a. Barang	-0,44	24,79	11,87	-15,39	2,95
6.b. Jasa	12,27	33,10	23,26	13,02	12,67
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	15,77	40,41	10,65	-4,64	14,09
7.a. Barang	15,64	39,88	9,61	-5,87	13,92
7.b. Jasa	20,67	60,22	44,58	26,03	17,12
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	6,92	49,17	14,21	5,44	16,87
8.a. Ekspor	8,33	39,71	29,18	16,06	14,84
8.b. Impor	12,91	10,81	90,76	42,21	11,15
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	-5,36	6,39	12,22	8,95	7,31

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 6 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran di Provinsi Banten, 2020–2024

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g)	-2,01	2,40	4,11	3,96	4,83
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	-2,84	2,80	4,35	3,92	4,88
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	1,39	-0,69	3,20	1,53	1,13
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	3,33	1,16	-0,12	3,61	3,43
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	0,57	1,62	1,40	2,85	3,27
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	-4,80	4,23	7,31	4,98	7,23
1.f. Hotel dan Restoran	-4,50	1,38	5,99	4,47	4,00
1.g. Lainnya	-0,56	-0,06	1,04	2,48	2,45
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-8,28	-1,73	2,00	3,62	13,82
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	-9,51	0,99	0,22	0,07	4,39
3.a. Konsumsi Kolektif	-17,05	1,15	0,40	0,07	5,94
3.b. Konsumsi Individu	-0,32	0,83	0,03	0,06	2,80
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	-0,07	4,41	3,68	3,43	2,63
4.a. Bangunan	-0,63	5,08	3,89	0,96	1,46
4.b. Non-Bangunan	1,22	2,93	3,22	9,13	5,13
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	-4,05	16,95	5,89	-13,52	2,30
6.a. Barang	-4,07	17,03	5,90	-13,62	2,27
6.b. Jasa	-1,22	4,95	3,23	3,26	7,62
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	-6,35	8,01	1,63	-5,78	12,19
7.a. Barang	-6,46	8,08	1,59	-6,06	12,24
7.b. Jasa	-1,06	4,78	3,30	7,18	10,08
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	-11,89	4,56	2,06	7,74	19,62
8.a. Ekspor	-6,05	6,34	9,48	9,95	12,22
8.b. Impor	9,73	10,19	24,74	13,65	0,41
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	-3,39	4,49	5,03	4,81	4,79

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 7 Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran di Provinsi Banten, 2020–2024

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g)	206,27	214,88	238,16	254,75	277,21
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	190,43	201,49	229,92	244,22	267,07
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	195,97	198,94	213,06	224,01	235,16
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	211,45	216,68	225,44	242,89	257,84
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	217,93	223,83	233,00	244,36	256,57
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	215,85	226,13	260,45	282,58	317,74
1.f. Hotel dan Restoran	214,18	221,69	241,98	258,21	275,26
1.g. Lainnya	246,19	250,33	264,16	282,54	301,38
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	219,20	226,15	239,43	258,85	305,55
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	220,16	234,38	246,17	266,65	298,10
3.a. Konsumsi Kolektif	213,50	227,15	237,74	257,49	292,05
3.b. Konsumsi Individu	227,99	242,87	256,07	277,41	305,21
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	269,55	289,24	315,63	343,01	363,31
4.a. Bangunan	305,63	331,05	361,49	384,66	398,55
4.b. Non-Bangunan	215,57	226,68	247,00	280,69	310,58
5. Perubahan Inventori	0,17	0,10	0,57	0,37	2,07
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	196,83	245,75	275,14	233,49	240,64
6.a. Barang	196,88	245,69	274,85	232,54	239,40
6.b. Jasa	189,74	252,53	311,28	351,82	396,40
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	193,04	271,04	299,91	286,01	326,29
7.a. Barang	192,23	268,89	294,74	277,44	316,07
7.b. Jasa	229,34	367,43	531,24	669,50	784,15
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	217,52	324,47	370,59	390,74	456,64
8.a. Ekspor	216,26	302,15	390,33	453,00	520,25
8.b. Impor	212,53	235,50	449,26	638,87	710,12
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	230,56	245,29	275,25	299,90	321,82

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 8 Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran di Provinsi Banten, 2020–2024

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g)	151,98	155,63	162,03	168,44	176,58
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	142,57	146,56	152,94	158,94	166,71
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	149,44	148,41	153,16	155,50	157,27
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	152,72	154,48	154,29	159,85	165,34
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	153,75	156,25	158,44	162,96	168,29
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	164,48	171,43	183,96	193,12	207,08
1.f. Hotel dan Restoran	147,15	149,18	158,12	165,19	171,79
1.g. Lainnya	171,58	171,47	173,25	177,54	181,89
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	158,80	156,05	159,17	164,93	187,72
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	142,75	144,17	144,48	144,58	150,92
3.a. Konsumsi Kolektif	133,00	134,54	135,07	135,17	143,20
3.b. Konsumsi Individu	154,21	155,49	155,54	155,63	160,00
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	176,15	183,92	190,70	197,25	202,44
4.a. Bangunan	203,24	213,55	221,85	223,99	227,26
4.b. Non-Bangunan	135,62	139,59	144,08	157,23	165,29
5. Perubahan Inventori	0,16	0,08	0,44	0,26	1,42
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	139,57	163,24	172,84	149,47	152,92
6.a. Barang	139,78	163,59	173,24	149,65	153,04
6.b. Jasa	113,59	119,21	123,07	127,07	136,76
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	122,17	131,95	134,10	126,34	141,75
7.a. Barang	122,22	132,09	134,20	126,06	141,49
7.b. Jasa	119,92	125,65	129,80	139,12	153,14
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	129,84	135,77	138,57	149,30	178,59
8.a. Ekspor	142,15	151,16	165,49	181,95	204,18
8.b. Impor	178,88	197,10	245,85	279,41	280,56
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	162,51	169,80	178,34	186,92	195,88

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 9 Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100) Menurut Pengeluaran di Provinsi Banten, 2020–2024

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g)	135,72	138,07	146,99	151,24	156,99
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	133,57	137,48	150,33	153,65	160,20
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	131,14	134,05	139,11	144,06	149,53
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	138,46	140,26	146,12	151,94	155,94
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	141,74	143,25	147,06	149,96	152,46
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	131,23	131,90	141,58	146,33	153,44
1.f. Hotel dan Restoran	145,55	148,61	153,04	156,31	160,23
1.g. Lainnya	143,49	145,99	152,48	159,14	165,70
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	138,03	144,92	150,43	156,95	162,77
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	154,22	162,57	170,38	184,43	197,52
3.a. Konsumsi Kolektif	160,52	168,84	176,01	190,50	203,95
3.b. Konsumsi Individu	147,85	156,19	164,64	178,24	190,76
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	153,03	157,26	165,51	173,90	179,47
4.a. Bangunan	150,38	155,02	162,94	171,73	175,37
4.b. Non-Bangunan	158,96	162,39	171,43	178,53	187,90
5. Perubahan Inventori	103,78	125,08	128,87	140,32	145,95
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	141,02	150,55	159,18	156,21	157,37
6.a. Barang	140,85	150,19	158,65	155,39	156,42
6.b. Jasa	167,04	211,84	252,93	276,86	289,85
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	158,01	205,41	223,65	226,37	230,19
7.a. Barang	157,28	203,56	219,64	220,09	223,38
7.b. Jasa	191,24	292,42	409,29	481,25	512,03
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	167,52	238,99	267,44	261,72	255,69
8.a. Ekspor	152,14	199,89	235,86	248,98	254,80
8.b. Impor	118,81	119,48	182,73	228,65	253,11
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	141,88	144,46	154,34	160,44	164,30

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 10 Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100) Menurut Pengeluaran di Provinsi Banten, 2020–2024

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g)	1,38	1,73	6,46	2,89	3,80
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	1,27	2,92	9,35	2,21	4,26
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	2,63	2,22	3,77	3,56	3,80
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	1,48	1,30	4,17	3,99	2,63
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	1,13	1,07	2,66	1,97	1,67
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	-0,12	0,51	7,34	3,35	4,86
1.f. Hotel dan Restoran	2,11	2,10	2,98	2,14	2,51
1.g. Lainnya	7,08	1,75	4,44	4,37	4,12
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4,01	4,99	3,80	4,34	3,71
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	1,75	5,41	4,81	8,25	7,09
3.a. Konsumsi Kolektif	1,85	5,18	4,25	8,23	7,06
3.b. Konsumsi Individu	2,52	5,65	5,40	8,26	7,02
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	2,23	2,77	5,25	5,07	3,20
4.a. Bangunan	1,35	3,08	5,11	5,39	2,12
4.b. Non-Bangunan	4,11	2,16	5,57	4,14	5,25
5. Perubahan Inventori	-3,33	20,52	3,03	8,88	4,01
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	3,85	6,75	5,74	-1,87	0,74
6.a. Barang	3,78	6,63	5,64	-2,06	0,66
6.b. Jasa	13,66	26,82	19,40	9,46	4,69
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	23,62	30,00	8,88	1,22	1,69
7.a. Barang	23,63	29,42	7,90	0,21	1,50
7.b. Jasa	21,96	52,90	39,97	17,58	6,40
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	21,35	42,67	11,90	-2,14	-2,30
8.a. Ekspor	15,31	31,39	18,00	5,56	2,34
8.b. Impor	2,90	0,57	52,93	25,13	10,70
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	-2,04	1,82	6,85	3,95	2,40

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BANTEN**

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Kav H1-2
Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani, Kota Serang - Banten 42171
Telp : (0254) 267027

ISSN 2622-1179

